

STUDY OF MOHAMMAD HATTA THOUGHT CONCERNING DEMOCRACY IN INDONESIA

KAJIAN PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

¹Raden Levia Asriana, ²Aim Abdulkarim, ³Kokom Komalasari

¹Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

^{2,3}Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

E-mail : r.levia_asriana@gmail.com

ABSTRACT

This research motivated by implementation of democracy that Indonesian government do today that was not exactly fit with the founding fathers's idea when they built this nation, particularly Mohammad Hatta. The problems which described on this script was Mohammad Hatta thought concerning democracy and also in the implementation on policies that Indonesian government do today. This research is a qualitative reseach with historical method. For Mohammad Hatta democracy is transferring power from a man to the people and democracy actually have already been a costum among Indonesian people from long time ago.

Keywords: Political Thinking, Mohammad Hatta, Democracy

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang baiknya implementasi demokrasi di Indonesia saat ini dan praktiknya yang tidak sesuai dengan ide awal para pendiri bangsa, khususnya Mohammad Hatta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran demokrasi menurut Mohammad Hatta serta implementasinya di kebijakan-kebijakan yang diterapkan di pemerintahan Indonesia saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian historis. Demokrasi bagi Mohammad Hatta adalah perpindahan kedaulatan dari tangan satu orang ke tangan rakyat dan kebiasaan demokrasi sebenarnya sudah ada dalam kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu.

Kata Kunci: Pemikiran Politik, Mohammad Hatta, Demokrasi

Demokrasi adalah cara bernegara yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk ketidak-tundukkan Bangsa Indonesia kepada kaum penjajah manapun. Seperti yang diikrarkan oleh Bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Sejak awal para pendiri bangsa sepakat bahwa demokrasi yang Indonesia akan anut merupakan demokrasi yang bersumber dari kebiasaan bangsa kita sendiri, bukan demokrasi-liberal atau demokrasi-komunis. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kebebasan berpikir, berserikat, dan juga berkumpul, tetapi di lain pihak demokrasi Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah.

Mohammad Hatta merupakan salah satu pendiri bangsa yang memiliki pandangan yang sangat menarik akan demokrasi, oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta, khususnya dalam hal demokrasi. Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi yang akan dikaji penulis diantaranya mencakup kedaulatan rakyat, kebangsaan, demokrasi barat, dan demokrasi Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah, karena itu

dalam pelaksanaannya, peneliti harus melakukan tahap-tahap seperti yang Sjamsuddin (2007, hlm. 85) jelaskan bahwa “tahap metode sejarah mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan penelitian sejarah (historiografi).” Sedangkan untuk pengumpulan data, penulis melakukan teknik studi literatur yaitu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan kajian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat atau yang kita kenal sebagai demokrasi merupakan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa, bahkan itulah yang mendasari mereka berjuang mengorbankan jiwa dan raga melawan penjajah, yaitu untuk meraih demokrasi sehingga bangsa Indonesia mampu mengurus dirinya sendiri, tidak lagi didikte oleh para penjajah. Demokrasi modern atau barat merupakan hasil daripada pemberontakan yang terjadi di dunia barat kepada kaum feodal, sehingga meletuslah Revolusi Prancis pada 1789. “Patokannya yang dipakainya adalah, ‘manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka’. Semua manusia sama haknya, tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan hartawan maupun dengan rakyat jelata.” (Hatta, 2008, hlm. 65) Mohammad Hatta, merasa bahwa demokrasi di dunia barat mengalami kepincangan dan juga tidak sesuai dengan ide demokrasi yang bangsa Indonesia anut. Ia sering kali bicara mengenai demokrasi baik dalam bentuk tulisan yang kemudian ia rangkum menjadi buku *Demokrasi Kita* yang ditulisnya pada tahun 1966 yang kemudian dicetak ulang pada 2008 dan juga terdapat dalam dokumentasi tertulis pidato-pidato Hatta yang ia lakukan semasa hidup baik dalam forum-forum perkuliahan maupun forum-forum tingkat nasional maupun internasional. Menurut Mohammad Hatta, pada dasarnya kedaulatan atau demokrasi ialah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi adalah “suatu bentuk pemerintah daripada suatu kolektivitet yang melakukan pemerintahan sendiri.” (Hatta, 2000b, hlm. 415)

Kebangsaan

Hatta mengemukakan bahwa kebangsaan merupakan identitas seseorang akan bangsa dan tanah airnya. Kebangsaan merupakan tujuan dari pergerakan kemerdekaan. “Tidak ada pergerakan kemerdekaan yang terlepas dari semangat kebangsaan. Apa yang mau dimerdekakan dari sendiri? Cita-cita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia yang sama derajat dan sama merdeka dapat bersaudara (Hatta, 2008, hlm.16). Kita juga harus pahami lebih lanjut, bahwa kebangsaan tidak selalu saja berarti rasa cinta tanah air, tetapi juga orang-orang yang menggeluti bidang yang sama, misalnya kaum petani, kaum pedagang, dan lain-lain. Sesama pedagang akan lebih kuat rasa saling membantu satu sama lain daripada, seorang pedagang dengan seorang petani. Latar belakang orang tersebut akan juga dapat menentukan kebangsaan dari seseorang. Karena itu, rasa kebangsaan muncul, karena rasa senasib dan sepenanggungan diantara suatu kelompok tertentu. Rasa kebangsaan itu yang membangkitkan rasa untuk merdeka dari tiap individu-individu yang terjajah oleh bangsa lain. Karena rasa kebangsaan seseorang rela mengorbankan apapun bahkan nyawanya sendiri.

Manusia sebagai makhluk hidup yang menjadi pemimpin di bumi ini sejak lahir diberikan suatu keinginan yang pasti hendak dimiliki oleh setiap manusia, yaitu pengakuan atas keberadaannya. Penjajahan merenggut hal ini, karena itu manusia-manusia terjajah cepat atau lambat pasti menghendaki yang namanya kemerdekaan. Cinta bangsa dan tanah air sudah menjadi nyanyian yang merdu di telinga orang banyak, terutama bagi bangsa yang tidak merdeka, karena bangsa itu menjadi ukuran manusia dalam pergaulan internasional. Kalau satu bangsa mulia dan tinggi derajatnya, orangnyapun dihargai pula. Kalau seseorang tidak mempunyai kebangsaan, seperti kita anak jajahan, ia tidak dipandang orang dalam pergaulan internasional (Hatta, 2008, hlm. 17).

Demokrasi Barat

Demokrasi barat lahir di abad ke-18, kemudian terjadi puncaknya pada Revolusi Prancis pada tahun 1789-1799. Sampai saat ini masyarakat di benua barat sangat menjunjung tinggi Revolusi Prancis sebagai sumber demokrasi. Menurut Hatta sampai saat ini

demokrasi di benua barat belum menemukan bentuknya yang sempurna, ini dikarenakan individualisme yang mereka terus pertahankan. Ia menjelaskan:

Tujuan pemberontakan zaman baru itu, yang mencapai muaranya pada Revolusi Prancis tahun 1789, ialah memerdekakan manusia, individu dari segala ikatan. Patokan yang dipakainya adalah “manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka”. Semua manusia sama haknya, tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan hartawan maupun dengan rakyat jelata. Ia mendapat hak memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dan berhak pula untuk dipilih jika cukup syarat.

Yang diutamakan disini ialah hak orang-seorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Orang-seorang merdeka dalam tindakan politiknya...

Tetapi puaskah rakyat yang terbanyak dengan mendapat hak-hak politik yang sama itu? Terjaminkah dengan itu penghidupan sebagai anggota masyarakat? (Hatta, 2008, hlm. 66)

Lebih lanjut Hatta berpendapat bahwa demokrasi yang diselenggarakan di benua barat hanyalah demokrasi dalam bidang politik, tetapi tidak dalam bidang ekonomi. Karena itu menurutnya, demokrasi barat mengalami kepincangan. Bahwa trilogi “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” yang menjadi semboyannya, tidak terlaksana di dalam praktik. Itu tidak mengherankan, karena revolusi Perancis meletus sebagai revolusi individual untuk kemerdekaan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinya orang lupa akan rangkaiannya dengan persamaan dan persaudaraan (Hatta, 2000a, hlm. 434).

Demokrasi Indonesia: Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi

Demokrasi yang diharapkan oleh Hatta bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia paska kemerdekaan ialah demokrasi kita: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Mengenai hal ini para pendiri bangsa megabadikannya ke dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Negara (UUD) kita yang berbunyi: “...perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada

saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Hatta (2000a) mengemukakan:

Sekarang Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat sudah kita miliki, sekali pun dalam keadaan yang belum sempurna. Tugas yang terutama bagi bangsa kita di masa datang ialah melaksanakan Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur. Dengan terlaksananya berangsur-angsur Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur, tercapailah pula kelak penyempurnaan daripada Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. (Hatta 2000a, hlm. 414).

Indonesia sejak awal merdeka menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, “sesuai dengan cita-cita rakyat ini, tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1, bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” (Hatta, 2000a, hlm. 415) Demokrasi yang dimaksud oleh Hatta (2000a) adalah:

Suatu bentuk pemerintah daripada suatu *kolektivitet* yang melakukan pemerintahan sendiri. Bagian yang terbesar daripada anggotanya ikut serta langsung atau tak langsung dalam pemerintahan sendiri itu. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat terjamin, demikian juga persamaan tiap-tiap orang dalam undang-undang. Dan pemerintahan demokrasi hanya tumbuh apabila seluruh masyarakat dimasuki semangat demokrasi, semangat sama rata sama rasa, sedangkan pemerintah dan pemimpin rakyat menjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. (hlm. 415)

Hatta (2000a) juga menambahkan bahwa dasar pemerintahan demokrasi di Indonesia juga diperkuat dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang dasar Indonesia, pada pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa “kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.” Kemudian terdapat pada pasal 35 yang menyatakan bahwa

“kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa.” Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang memang asli dari Indonesia, yang telah hidup bertahun-tahun dalam keseharian bangsa kita. Demokrasi kita bukanlah demokrasi barat yang “pincang” demokrasi kita harus sesuai dengan “cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial”. (Hatta, 2000a, hlm. 435) Menurut Hatta dalam merumuskan demokrasi yang cocok di Indonesia, kita perlu belajar dengan demokrasi yang dianut oleh benua barat dalam hal demokrasi politik, dan mengolaborasikannya dengan kebiasaan asli masyarakat Indonesia dalam hal demokrasi ekonomi, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia bersendi pada nilai kolektivisme, bukan individualisme. Kolaborasi dari demokrasi inilah yang Hatta anggap sempurna sebagai dasar pemerintahan Republik Indonesia, kedaulatan rakyat yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang diharapkan oleh Hatta terjadi di Indonesia adalah demokrasi sosial, demokrasi ini bersumber dari tiga hal:

Pertama, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. *Kedua* adalah ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. *Ketiga*, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. (Hatta, 2000a, hlm. 435)

Pembahasan

Pada hakikatnya Mohammad Hatta adalah seorang sosialis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, ia adalah seorang sosialis demokrat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang diambil dari artikel Dialog (dalam Yayasan Idayu, 1982, hlm. 26) berikut ini:

Bung Hatta adalah seorang demokrat, yang berjuang dengan teguh menegakkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dalam kehidupan bangsa. Ditantanginya diktatur tetapi didukungnya kepemimpinan yang kuat dan berwatak. Dia menantang penjajahan modal dan penjajahan ekonomi dan

rumusannya bagi demokrasi ekonomi, ialah pembentukan struktur koperasi dalam ekonomi.

Kemudian pernyataan bahwa Hatta sebagai seorang demokrat juga dikemukakan oleh Rachman Tolleng (dalam Yayasan Idayu, 1982, hlm. 46), “Ia seorang nasionalis, patriot, tetapi sebelum menjadi nasionalis ia adalah seorang sosial demokrat dulu. Dan selaku sosial demokrat Hatta lebih memberat ke demokrasinya daripada ke sosialisme”, kemudian Hutabarat (2015, hlm. 12) menjelaskan asal paham sosialisme yang dimiliki Hatta:

Paham sosialisme Bung Hatta juga bersumber dari kolektivisme Indonesia yang tercermin dari masyarakat desa, berupa gotong royong dan asas kekeluargaan. Karena itu, Bung Hatta menilai bangsa Indonesia tidak memerlukan pemimpin besar, yang bisa memutuskan segala perkara yang tidak bisa diselesaikan. Baginya, azas kekeluargaan itu perlu dicerminkan pada niat, yang dalam perdebatan bukan mencari permusuhan tapi kebenaran.

Selanjutnya sumber sosialisme Bung Hatta yang lainnya adalah paham sosialisme Barat, karena ia tinggal di negeri Belanda semasa sekolah. Ia banyak mempelajari keberhasilan Fabian Society di Inggris, yang merupakan laboratorium pengolahan masalah-masalah kemasyarakatan. Ia juga mempelajari koperasi di Skandinavia. Karena itu, ia berpendapat bahwa pelaksanaan sosialisme di Indonesia dapat dipercepat dengan perkembangan gerakan koperasi. Gerakan koperasi bukan saja menolak kapitalisme, tapi juga merupakan alat untuk membentuk budi daya mulia seorang insan.

Sosok Mohammad Hatta sebagai seorang demokrat juga disampaikan oleh Nurcholis Madjid (Suleman, 2010, hlm. 6) yang menyebutkan bahwa: “Bung Hatta dipandang oleh banyak kalangan sebagai peletak dasar konsep keindonesiaan yang lebih mendalam yaitu konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi.” Maka dari itu, dalam berpikir, bersikap, maupun berbicara nilai-nilai demokrasi sangat kental dari kepribadian Hatta.

Demokrasi atau Hatta menyebutnya dengan kedaulatan rakyat pada hakikatnya pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi adalah “suatu bentuk pemerintah daripada suatu *kolektivitet* yang melakukan pemerintahan sendiri.” (Hatta, 2000b, hlm. 415) Karena itu, demokrasi bagi Hatta adalah saat dimana suatu pemerintahan kedaulatannya bukan lagi di tangan raja, tetapi di tangan rakyat secara kolektif melakukan pemerintahan sendiri, yang kemudian ia klasifikasikan ke dalam dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi barat dan demokrasi Indonesia. Hatta adalah seorang terpelajar yang sangat menguasai macam-macam demokrasi dan demokrasi seperti apa yang cocok untuk diimplementasikan pada Indonesia di kemudian hari. Kemampuan Hatta dalam menganalisis demokrasi sangat tajam. Analisis yang dilakukan Hatta dalam memaknai demokrasi menyeluruh dari berbagai macam aspek, seperti yang dipaparkan oleh Zubaidi (2011, hlm. 94): Lebih lanjut Hatta menyatakan bahwa demokrasi Indonesia yang bercorak kerakyatan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Nilai-nilai fundamental tersebut apabila ditinjau dari perspektif aksiologis, khususnya teori hierarki/ jenjang nilai dari Scheler, konsep demokrasi Hatta tersebut mencakup seluruh jenjang nilai. Enam nilai fundamental tersebut (kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan) telah mewakili empat jenjang nilai, dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi; dari nilai kenikmatan material sampai dengan nilai kesucian religius.

Demokrasi Barat

Hatta merupakan seorang pemikir yang kritis dalam memahami sesuatu, termasuk dalam hal demokrasi. Hatta tidak menafikan bahwa konsep demokrasi dilahirkan di negara-negara barat, sejak Masa Yunani kuno pada abad ke-18, kemudian ke masa Romawi, hingga akhirnya mencapai puncak kejayaannya di masa Revolusi Prancis 1789-1799, akan tetapi dalam perjalanan demokrasi di negara-negara barat tersebut, ia melihat satu kekurangan yaitu demokrasi hanya terletak dalam hal politik, belum dalam ekonomi. Ini membuat masyarakat di negara-negara barat hidup dalam kebebasan politik, tetapi dari sisi ekonomi

mereka tetap sengsara, karena negara tidak diberi tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Dari pendapat Hatta tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia selain mempelajari secara mendalam mengenai demokrasi, ia juga menganalisis lebih lanjut demokrasi tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Suleman (2010, hlm. 7) bahwa:

Sebagai seorang pemikir sekaligus pejuang kemerdekaan, Hatta menghadapi persoalan: tatanan seperti apa yang sesuai dan yang perlu diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka nantinya. Hatta dengan sadar memilih dan merancang demokrasi untuk membangun Indonesia merdeka. Lebih khusus lagi, demokrasi Hatta berwatak sosialis... demokrasi Hatta berbeda dengan demokrasi Barat, termasuk dengan paham demokrasi sosial ini. Justru, pemikiran Hatta tentang demokrasi yang berwatak sosialis ini berangkat dari sikapnya yang kritis, tetapi rasional terhadap demokrasi Barat. Jadi berbeda misalnya dengan Sjahrir yang hampir sepenuhnya menerima demokrasi Barat atau Soekarno tua yang hampir sepenuhnya anti demokrasi Barat.

Dari cara berpikir analisis, Hatta merumuskan demokrasi yang ia cita-citakan untuk Indonesia, yaitu kombinasi dari pemikiran barat, pemikiran Islam, dan juga pemikiran asli dari Indonesia sendiri, yang ia beri nama Demokrasi Indonesia: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pada hakikatnya tujuan bernegara adalah untuk menyejahterakan rakyat, karena itu, apabila hal yang diberikan hanyalah kebebasan politik tanpa kesejahteraan ekonomi kepada rakyat, tentulah tidak ada artinya kebebasan politik itu bagi rakyat, tanpa kesejahteraan secara ekonomi. Karena itu, menurut Hatta demokrasi di negara barat mengalami kepincangan, karena tanpa memberikan demokrasi dalam ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Suleman (2010, hlm. 148) bahwa:

Dari segi substantifnya, Hatta justru melihat demokrasi politik sebagai sesuatu yang mulia, yaitu tatanan yang mengandung semangat kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, sebagaimana yang dikemukakan Hatta dalam tulisan-tulisannya. Tetapi,

persoalannya bagi Hatta, dari sejarah kelahirannya, tatanan demokrasi dibentuk untuk kepentingan dan kesinambungan kekuasaan kaum pemilik modal.

Menurut Hatta demokrasi yang dihasilkan dari Revolusi di Prancis, hanya perpindahan kekuasaan dari kaum bangsawan kepada kaum kapitalis, dan kehidupan ekonomi masyarakat tetap pada keadaan sebelumnya, ditindas oleh penguasa yang berganti pakaian dari para bangsawan menjadi para pemegang modal besar. Peneliti setuju dengan yang Hatta kemukakan karena benar bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi akan sia-sia, Indonesia setelah mempraktikkan demokrasi langsung, menurut peneliti mengalami penurunan kualitas pemimpin, cukup sulit mempraktikkan demokrasi langsung, apabila sebagian besar kesejahteraan masyarakatnya masih kurang, itulah mengapa masih terjadi praktik politik uang dalam kegiatan pemilu di Indonesia saat ini.

Kemudian berkaitan dengan demokrasi di dunia barat, Hatta juga menjelaskan mengenai hubungan antar-negara di Eropa saat itu, walaupun makna demokrasi yang di agung-agungkan paska Revolusi Prancis adalah kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, faktanya rasa persamaan dan persaudaraan pada Bangsa Eropa itu tidak begitu terlihat. Salah satunya adalah wacana di zaman itu (1929) untuk membuat Uni Eropa, yang kemudian terlaksana, tetapi baru-baru ini Britania Raya mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota Uni Eropa, setelah dilakukan referendum pada 23 Juni 2016 oleh masyarakat Britania Raya. Peneliti anggap pernyataan Hatta cukup visioner mengenai hubungan antar-negara di dunia barat, yaitu masyarakat Eropa sulit untuk bersatu, karena memiliki perasaan *irredenta*. *Irredenta* dijelaskan oleh Hatta (2000b, hlm. 19-20) sebagai berikut:

Irredenta yaitu suatu perkataan Italia. Maksudnya menyatakan bahwa sebagian dari rakyat Italia dan bangsa Italia hidup dalam negeri asing, di bawah perintah negeri asing. Manakala timbul cita-cita buat merebut kembali tanah sendiri itu yang dialami oleh bangsa sendiri, tetapi terletak di bawah bendera asing, maka hiduplah soal *irredenta*.

Perasaan ini yang menghambat rakyat Eropa untuk bersatu. Pernyataan Hatta terbukti sudah, bahwa di Eropa sebagian bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa Eropa lainnya, perasaan tidak mau dipimpin oleh bangsa Eropa lainnya. Selama perasaan ini terus ada pada masyarakat Eropa, persatuan Eropa tidak akan pernah terwujud.

Demokrasi Indonesia: Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi

Demokrasi yang dicita-citakan untuk diterapkan di Indonesia sesungguhnya bukan saja oleh Hatta, melainkan oleh seluruh bapak bangsa Indonesia lainnya adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi ini adalah demokrasi dimana bukan saja hak politik yang diberikan kepada rakyat, melainkan juga hak ekonomi, dimana kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi hal tersebut. Berkaitan dengan hal ini, para pendiri bangsa memasukkannya ke dalam pembukaan Undang- Undang Dasar kita, yaitu: "...perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Kemudian berlandaskan dari Undang-Undang Dasar tersebut, berkaitan dengan demokrasi juga dilanjutkan ke dalam pasal Undang-Undang Dasar, diantaranya pasal 1 ayat (2) dan pasal 35. Hatta menjelaskan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah demokrasi barat yang "pincang", melainkan demokrasi asli dari Indonesia, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Menurut Hatta dalam merumuskan demokrasi yang cocok di Indonesia, kita perlu belajar dengan demokrasi yang dianut oleh benua barat dalam hal demokrasi politik, dan mengolaborasikannya dengan kebiasaan asli masyarakat Indonesia dalam hal demokrasi ekonomi, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia bersendi pada nilai kolektivisme, bukan individualisme. Kolaborasi dari demokrasi inilah yang Hatta anggap sempurna sebagai dasar pemerintahan Republik Indonesia, kedaulatan rakyat yang meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang diharapkan oleh Hatta terjadi di Indonesia adalah demokrasi sosial, demokrasi ini bersumber dari tiga hal:

Pertama, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. *Kedua* adalah ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan...*Ketiga*, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. (Hatta, 2000a, hlm. 435)

Jadi jelaslah demokrasi yang di Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tercantum pada sila kedua Pancasila: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Karena itu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa diterima di Indonesia, termasuk di dalamnya penjajahan. Kemudian pada poin kedua dijelaskan oleh Hatta bahwa demokrasi Indonesia juga bersumber dari ajaran Islam, karena itu demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang mendewakan materil, kebebasan tiada terkira, maupun tidak diakuinya agama atau tuhan sebagai pencipta alam semesta berikut isinya. Demokrasi di Indonesia seperti yang dipaparkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, dari kalimat tersebut jelaslah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai spritual, walaupun bukan negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara yang beragama. Kemudian, nilai terakhir yaitu kolektivisme. Betul zaman berubah, nilai kolektivisme sudah sangat memudar di masyarakat khususnya, di perkotaan, tapi apabila kita lihat di pedesaan, kolektivisme masih sangat kental di masyarakat. Keberhasilan kemerdekaan kita tidak mungkin apabila tidak ada gotong royong di masyarakat. Masyarakat mengorbankan materi, jiwa dan raga demi kemerdekaan. Kolektivisme merupakan nilai yang perlu dikembalikan di tengah-tengah masyarakat, karena individualisme bukanlah identitas bangsa kita, gotong royong adalah kebiasaan yang selalu dominan pada bangsa kita sejak dulu kala.

Kemudian Hatta juga mencontohkan kolektivisme di tengah masyarakat kita saat Indonesia masih merupakan negara feodal. Kepemilikan tanah di tengah masyarakat bukanlah dimiliki oleh raja, melainkan oleh seluruh rakyat, karena itu apabila suatu lahan tanah hendak digunakan, rakyat akan berkumpul dan melakukan musyawarah apakah lahan itu boleh dipergunakan atau tidak. Kemudian, apabila lahan tersebut hendak didirikan bangunan berupa rumah, tempat ibadah, atau apapun, masyarakat tersebut akan saling membantu untuk mendirikan bangunan tersebut. Kemudian bahkan di masa yang sama demonstrasi sudah dikenal, “apabila rakyat merasa keberatan sekali atas peraturan yang diadakan oleh pembesar daerah, maka kelihatan rakyat datang sekali banyak ke alun-alun di muka rumahnya dan duduk di situ beberapa lama dengan tiada berbuat apa-apa.” (Hatta, 2000a, hlm. 437) Maka dari itu, demokrasi pada hakikatnya bukanlah suatu barang baru bagi masyarakat Indonesia, demokrasi telah ada pada bangsa ini bahkan sebelum Belanda datang dan menjajah bangsa ini. Kemudian dari sisi ekonomi, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan nilai-nilai gotong-royong, karena itu ekonomi Indonesia berlandaskan koperasi, dimana rakyat bisa menabungkan uangnya di koperasi, yang kemudian bisa digunakan oleh rakyat lain yang sedang membutuhkan untuk di kemudian hari dikembalikan. Koperasi juga bisa sangat membantu bagi masyarakat memasarkan hasil produksi mereka sendiri. Koperasi apabila betul-betul dilaksanakan dengan baik akan sangat mungkin untuk menjalankan roda perekonomian bangsa kita, akan tetapi ada hal yang perlu disampaikan pula bahwa Hatta bukanlah seseorang yang anti-individualisme, Hatta percaya bahwa kolektivisme dan individualisme pada dasarnya dapat diterapkan secara beriringan, seperti yang dijelaskan oleh Latif (2014, hlm. 380) berikut ini:

Mohammad Hatta juga menekankan bahwa dengan menganut paham negara kekeluargaan, tidak berarti individu kehilangan kebebasannya untuk berbeda pendapat. Ia mengingatkan, “dalam *collectivism*, ada sedikit hak bagi anggota-anggota dari keluarga itu, mengeluarkan perasaannya untuk mengadakan, menjadikan badan *collectivism* itu dengan sebaik-baiknya”.

Usul untuk memperhatikan hak pokok warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, menurutnya, tiada lain demi menjaga “supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus itu nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas.

Pada hakikatnya demokrasi Indonesia: demokrasi politik dan ekonomi bagi Hatta dapat dijabarkan bahwa demokrasi politik artinya, kedaulatan di tangan rakyat. Para penyelenggara negara hanyalah orang-orang yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan demokrasi ekonomi artinya, kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, pemerintah sebagai pemegang kendali, harus dapat mendistribusikan kekayaan yang Indonesia miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya bagi kemaslahatan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, ada hal krusial bagi Hatta yang harus dipenuhi dalam mempraktikkan demokrasi yaitu pendidikan, Roeslan Abdulgani (dalam Yayasan Idayu, 1982, hlm.

170) mengatakan pembeda antara Hatta dengan Soekarno adalah:

Jika Bung Karno itu adalah penggerak dan pembangkit sentimen-sentimen nasional, maka Bung Hatta tidak demikian. Dia lebih banyak menjadi “*guardian*”, yang mengisi dan memberi arah. Juga dalam kaderisasi, bila Bung Karno selalu mulai dari massa, katakanlah 100.000 orang, maka kemudian dia akan dapatkan 100 kader. Bung Hatta lain, dia mulai dari lima orang, tapi akan dapat 100 kader juga.

Maksud dari Abdulgani adalah cara kedua proklamator mencetak kader-kader penerus ide mereka, dimana Soekarno lebih menyukai dengan cara agitasi, ia berpidato dihadapan beribu-ribu rakyat, memang Soekarno memiliki kemampuan persuasif yang sangat tinggi, caranya berpidato menghinoptis banyak orang dan dapat membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah dan tidak membutuhkan waktu lama seperti yang dilakukan oleh Hatta dalam kaderisasi. Cara Hatta sangat lain dengan Soekarno dalam

mengkaderisasi sangatlah jauh berbeda dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena cara Hatta adalah dengan mendidik kader-kader tersebut, kemudian kader-kader yang telah dididik menyebarluaskan hasil didikan kepada kader-kader lain yang hendak dikaderisasi. Karena menurut Hatta pendidikan politik lebih penting dan efektif. Hatta adalah orang yang berpendidikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan, percuma saja bagi Hatta suatu kemerdekaan apabila rakyat tidak paham apa itu kemerdekaan dan bagaimana caranya mengisi kemerdekaan tersebut, oleh karena itu penting rakyat diberikan pendidikan politik sebelum akhirnya terjun untuk meraih kemerdekaan tersebut. Itulah yang mendasari Hatta mendirikan partai politik yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia bersama Sjahrir yang bertujuan untuk mendidik rakyat Indonesia untuk menyongsong kemerdekaan. Seperti yang dikemukakan Hatta (2008, hlm.

24) berikut ini:

...dasar kerakyatan bagi Pendidikan Nasional Indonesia supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasar Keadilan dan Kebenaran, haruslah rakyat insyaf akan hak dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya, cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat... rakyat itu daulat alias raja atas dirinya.

Karena itu, pendidikan politik sangat penting bagi Hatta untuk dimiliki rakyat, apabila rakyat paham hak serta kewajibannya sebagai rakyat, maka dalam pemerintahan, rakyat akan mampu mengendalikan pemerintah dari kesewenang-wenangan dan rakyat akan mampu melestarikan kemerdekaan yang telah dimiliki dan tidak akan lagi jatuh ke tangan penjajah di kemudian hari karena negara lain akan melihat bahwa bangsa Indonesia memang telah mampu mengurus dirinya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain.

Demokrasi di Indonesia menurut Hatta akan selalu hidup dan tak akan pernah padam, seperti yang dikemukakannya, Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan daripada beberapa

negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat berakar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. (Latif, 2014, hlm. 391).

SIMPULAN

Mohammad Hatta berpendangan bahwa kedaulatan atau demokrasi ialah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah daripada suatu *kolektivitet* yang melakukan pemerintahan sendiri, kemudian ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang berasal dari kebiasaan asli kita sendiri, bukan demokrasi barat.

Demokrasi di dunia barat adalah demokrasi yang “pincang”, karena hanya demokrasi politik saja, secara ekonomi masyarakat tidak diberi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi yang akan diimplementasikan di Indonesia adalah Demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi politik dan ekonomi. Demokrasi Indonesia menurut Hatta haruslah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berarti tidak seperti demokrasi yang lahir dari Revolusi Perancis dengan semangat *liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), yang membuahkan kebebasan politik bagi rakyat dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berbicara, hak-hak individu, mencalonkan diri menjadi pemimpin, dan hak-hak politik lainnya, tetapi kesejahteraan rakyat tidak disertakan dalam pemerintahan saat itu, sehingga kaum miskin masih tetap miskin paska revolusi dilakukan, dikarenakan yang menggantikan kursi para bangsawan adalah kaum kapital dan orang-orang kaya, sehingga kebijakan pemerintahan sangat berpihak pada kaum kapital dan tidak menguntungkan kaum miskin. Belajar dari hal tersebut, Hatta menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi, dimana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara, sehingga hak-hak ekonomi rakyat harus disediakan oleh negara dan semua yang ada di bumi Indonesia harus dimanfaatkan oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Disamping dari segi kaderisasi, perbedaan Hatta dan Soekarno mengenai demokrasi juga terjadi saat demokrasi terpimpin hendak dipraktikkan di Indonesia oleh Soekarno, Aman (tanpa tahun, hlm. 6) menjelaskan:

Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia. Kepercayaan yang mendalam kepada prinsip demokrasi inilah yang pernah menempatkan Hatta pada posisi yang berseberangan dengan Bung Karno ketika masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Hatta menilai sistem ini sebagai sistem otoriterian yang menindas demokrasi. Sekalipun pendapatnya berbenturan dengan Bung Karno, Hatta tetap saja memberikan *fair chance* kepada presiden untuk membuktikan dalam realitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Aman. (Tanpa Tahun). *Pemikiran hatta tentang demokrasi, kebangsaan dan hak azasi manusia*, hlm 1-22.
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Latif, Y. (2014). *Mata air keteladanan*. Bandung: Mizan
- Hatta, M. (1981). *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hatta, M. (2000a). *Karya lengkap Bung Hatta, buku 2, kemerdekaan dan demokrasi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Hatta, M. (2000b). *Karya lengkap Bung Hatta, buku 3, perdamaian dunia dan keadilan sosial*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Hatta, M. (2008). *Demokrasi kita*. Bandung: Segi Arsy.
- Hatta, M. (2011c). *Untuk negeriku: sebuah otobiografi, menuju gerbang kemerdekaan*. Jakarta: Kompas.
- Hatta, M. (2014). *Kedaulatan rakyat, otonomi, & demokrasi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Hutabarat, P.N. (2015). *Pemikiran politik Mohammad Hatta tentang demokrasi*, hlm 1-15.
- Priyadi, S. (2012). *Metode penelitian pendidikan sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suleman, Z. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Yayasan Idayu. 1982. *Bung Hatta kita dalam pandangan masyarakat*. Jakarta: PT Inti Idayu Press
- Zubaidi, A. (2011). *Jurnal Filsafat. Landasan aksiologis pemikiran bung hatta tentang demokrasi*. 21 (2), hlm. 87-98.